



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
UNIT KERJA : DINAS PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ELLY ISRIANI ARIEF
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 438064

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 9.592.900.000

1. Tanah Seluas 2925 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL SENDIRI Rp. 292.500.000
2. Tanah Seluas 892 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL SENDIRI Rp. 892.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 4279 m2/260 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL SENDIRI Rp. 4.779.600.000
4. Tanah Seluas 1486 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL SENDIRI Rp. 445.800.000
5. Tanah Seluas 2763 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL SENDIRI Rp. 2.763.000.000
6. Tanah Seluas 4000 m2 di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
7. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA GOWA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 20.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 13.000.000

1. MOTOR, YAMAHA X-TRIDE Tahun 2015, WARISAN Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 118.134.000

D. SURAT BERTHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 17.660.736

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 9.741.694.736



III. HUTANG

Rp.

180.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

9.561.694.736

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.